

**DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BERAU**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKJIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan LKJIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan LKJIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan LKJIP meliputi: rencana strategis; perjanjian kinerja; pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja; dan reviu dan evaluasi kinerja.

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah terdapat perubahan dalam sistem kinerja instansi pemerintah. Perubahan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban kepada pemimpin dan masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Dasar Pembentukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau adalah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13). Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau merupakan unsur Teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Berau melalui Sekretaris Daerah.

Menurut Peraturan Bupati Berau Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 4 Pebruari 2009, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau mempunyai target menyelenggarakan segala kewenangan Daerah dalam bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan UPTD;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

- Adaptasi atas perubahan lingkungan strategic
- Pengelolaan keberhasilan
- Orientasi ke masa depan
- Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditentukan selama kurun waktu tertentu
- Pelayanan Prima

Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan koordinasi perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

c. Sekretariat terdiri dari :

- Subbag Penyusunan Program

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan program dan penyusunan informasi serta evaluasi

- Subbag Umum dan Kepegawaian

Bertugas melakukan penyiapan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perpustakaan, kehumasan dan pengelolaan administrasi kepegawaian

- Subbag Keuangan
Bertugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi anggaran, pembukuan dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan

1. Bidang Pengembangan Koperasi

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia, fasilitasi pembiayaan permodalan dan pengembangan produksi usaha dan pemasaran koperasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang koperasi

- Seksi Pengembangan Usaha
Bertugas melakukan penyiapan bahan bimbingan, penciptaan, pengawasan dan evaluasi pembiayaan dan permodalan Koperasi
- Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi
Bertugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan produksi, usaha dan pemasaran produk koperasi dan usaha kecil serta melakukan analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan pihak terkait dibidang pengembangan usaha koperasi.
- Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi Simpan Pinjam/USP
Bertugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan kelembagaan serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia koperasi, peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang lembaga koperasi dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis.

2. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya

manusia, fasilitasi pembiayaan permodalan dan pengembangan produksi usaha dan pemasaran usaha mikro kecil dan menengah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang UKM

- Seksi Pengembangan Kemitraan
- Seksi Pengembangan Kewirausahaan
- Seksi Promosi

3. Bidang Perdagangan

Bertugas memberikan bimbingan teknis pembinaan ekspor impor, pemantauan dan evaluasi kegiatan impor, penyebaran informasi perdagangan dalam dan luar negeri, promosi dan misi dagang, kerjasama luar negeri dan penerbitan surat keterangan asal (SKA), serta penerbitan angka pengenal importit (API)

- Seksi Perdagangan Dalam Negeri
- Seksi Perdagangan Luar Negeri
- Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi

4. Bidang Pengelolaan Pasar

Bertugas memberikan bimbingan teknis pembinaan kegiatan pasar, pemantauan dan evaluasi kegiatan transaksi jual beli, penyebaran informasi dan perturan pasar, kebersihan dan keamanan pasar, serta pengelolaan administrasi dan teknis pasar.

- Seksi Operasional Pasar
- Seksi Retribusi Pasar
- Seksi Sarana dan Prasarana Pasar

5. Bidang Pengembangan Usaha Industri

Bertugas melaksanakan dan menyiapkan kebijakan, pembinaan dan pengembangan industry kecil dan menengah, industry kimia dan agro, industry logam mesin, elektronika, matematika, transportasi dan aneka

(ILMETA), mengkoordinasikan kerjasama kemitraan bidang industri, memberikan masukan/saran dalam rangka penerbitan izin usaha industri skala tertentu.

- Seksi Agro dan Hasil Hutan
- Seksi Elektronik dan Aneka
- Seksi Kimia, Logam dan Mesin

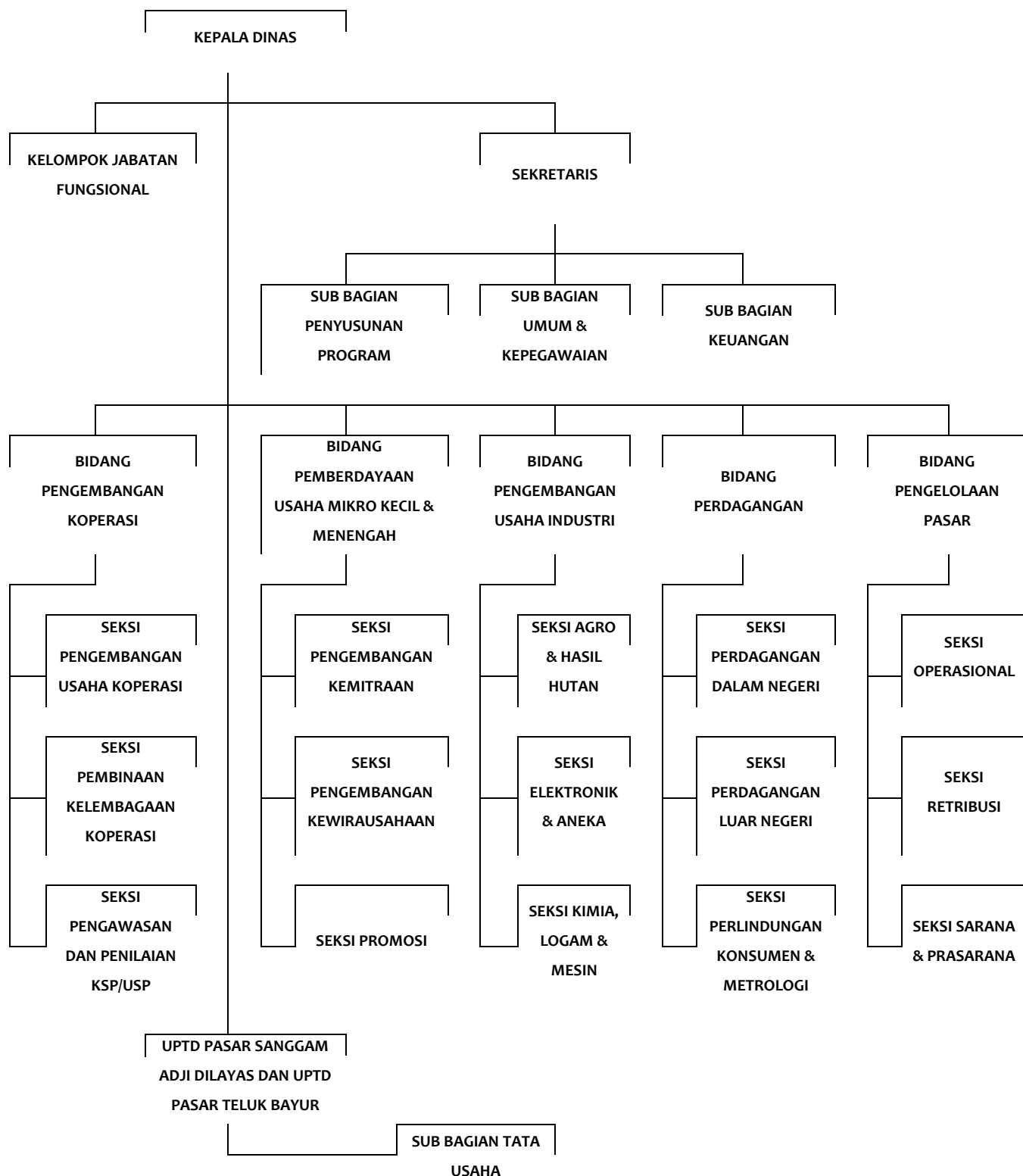
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- UPTD Pasar Sanggam Adji Dilayas
- UPTD Pasar Teluk Bayur

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau untuk tahun anggaran 2017 dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BERAU**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

Adapun struktur organisasi diatas menjelaskan tugas pokok sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
2. Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Dinas.
 - c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas.
3. Bidang Pengembangan Koperasi yang membawahi 3 (tiga) Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang

- koperasi yang meliputi pembinaan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha koperasi serta pengawasan dan penilaian KSP/USP.
- a. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di Bidang Koperasi di bidang pengembangan usaha koperasi.
 - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Koperasi di bidang pembinaan kelembagaan koperasi.
 - c. Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Koperasi di bidang pengawasan dan penilaian KSP/USP.
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang membawahi 3 (tiga) Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang meliputi pengembangan kemitraan, pengembangan kewirausahaan dan promosi.
- a. Seksi Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di bidang pengembangan kemitraan.
 - b. Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di bidang pengembangan kewirausahaan.
 - c. Seksi Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di bidang promosi.
5. Bidang Pengembangan Usaha Industri yang membawahi 3 (tiga) Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengembangan usaha industri yang meliputi agro dan hasil hutan, kimia, logam dan mesin serta elektronik dan aneka.

- a. Seksi Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Usaha Industri di bidang agro dan hasil hutan.
 - b. Seksi Elektronik dan Aneka mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Usaha Industri di bidang elektronik dan aneka
 - c. Seksi Kimia, Logam dan Mesin mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Usaha Industri di bidang kimia, logam dan mesin.
6. Bidang Perdagangan yang membawahi 3 (tiga) Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta perlindungan konsumen dan metrologi.
- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri.
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan di bidang perdagangan luar negeri.
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan di bidang perlindungan konsumen dan metrologi.
7. Bidang Pengelolaan Pasar yang membawahi 3 (tiga) Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang Pengelolaan Pasar yang meliputi operasional, retribusi serta sarana dan prasarana.
- a. Seksi Operasional Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Pasar di bidang operasional.
 - b. Seksi Retribusi Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Pasar di bidang retribusi.

- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Pasar di bidang sarana dan prasarana pasar.
8. UPTD terdiri dari 2 (dua) Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pasar yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan kegiatan teknis penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun sumber daya manusia aparatur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau per 31 Desember 2015 berjumlah 90 Orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 75 orang, sedangkan Honorer sebanyak 15 orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Komposisi jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

JABATAN	GOLONGAN				PENDIDIKAN						KET
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
KADIS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SEKRETARIS/ KABID	5	1	-	-	-	6	-	-	-	-	6
KASI / KASUBBAG	-	20	-	-	-	7	2	11	-	-	20
STAF	-	19	24	5	-	13	3	24	1	7	48
HONOR	-	-	-	-	1	1	-	8	4	3	17
PEGAWAI TITIPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	6	40	24	5	1	28	5	41	5	10	90

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan juga dari segi tingkat pendidikan belum cukup komposisi perbandingan antara sarjana dengan non sarjana untuk mengisi jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Sedangkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa : gedung kantor, kendaraan dinas, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut secara kuantitas sudah cukup untuk mendukung kinerja aparatur dinas namun dalam pelaksanaannya masih kurang memadai dikarenakan belum terorganisir dengan baik sehingga untuk selanjutnya masih perlu dilakukan pengaturan sehingga dapat memperbaiki kualitas pelayanan dibidang penyelenggaraan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kepada masyarakat.

Pada tahun anggaran 2017, sumber pendanaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 melalui Belanja Daerah yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 24.958.930.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 7.064.850.000,00 (Tujuh Milyar Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp 17.894.080.000,00 (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).

C. Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau melalui bidang industri banyak menerima proposal permohonan bantuan, baik bantuan berupa peralatan dan bantuan modal, maka diperlukan data yang valid untuk menyalurkan, agar tidak terjadi ketidakseimbangan /ketidakadilan, supaya tidak terjadi permasalahan;
2. Banyaknya pengusaha yang kurang memahami regulasi tentang cara import dan eksport yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan perkembangan perusahaan tersebut;
3. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam distribusi penjualan barang dan jasa dan banyaknya perusahaan yang tidak mengurus perijinan untuk melakukan usaha;
4. Rendahnya SDM pengurus koperasi, dalam hal manajemen keuangan, pemasaran, pencarian bahan produk dan menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama tetapi hanya sebagai pekerjaan sampingan saja, sehingga koperasi tidak bisa berkembang secara maksimal;
5. Sulitnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan sistem kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi informatika;
6. Kurangnya pengembangan unit usaha di koperasi untuk melayani nasabah koperasi yang semakin berkembang menyebabkan pangsa pasar yang seharusnya bias ditangkat koperasi menjadi terbuang;
7. Terbatasnya promosi dan investasi dan fasilitas sehingga diperlukan regulasi dalam rangka melayani investor dengan memberikan intensif bagi calon investor bidang fiskal dan non fiskal nasional;

8. Dalam bidang pengendalian investasi, investor dalam menyampaikan laporan masih terbatas, dan ada beberapa investor yang pindah lokasi, investor yang bidang usahanya tidak sesuai dengan perijinan yang dimiliki tanpa pemberitahuan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau;

D. Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2017

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2017 selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau tahun 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau tahun 2015 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan pengukuran hasil kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau tahun 2017 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau mencakup kegiatan yang dilaksanakan menyeluruh oleh 3 (tiga) Bidang yang ada pada SKPD. Yaitu Bidang Koperasi, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan. Masing-masing memegang peranan yang sama penting dalam usaha mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau tahun 2017 seperti dibawah ini:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RPJMD S/D TAHUN 2017
AGENDA II	Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berpihak Kepada Rakyat			
Tujuan 2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agribisnis dan ekowisata			
1.	Meningkatnya jumlah koperasi	jumlah koperasi aktif	koperasi	90
2.	Meningkatnya nilai volume usaha	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	15%
		Pertumbuhan industri	%	5%
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	18%
		Ekspor bersih perdagangan	USD/Rp	571,561,415.36
AGENDA III	Menciptakan Kabupaten Berau yang Aman, Demokratis dan Damai Didukung Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa dan Suasana Masyarakat yang Kondusif			
Tujuan 5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil			
1.	Meningkatnya perekonomian melalui berbagai sektor	Peningkatan PDRB	%	9,05%
		Jumlah PDRB	Rp (Milyar)	11.188,00

A.1 Bidang Koperasi

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam lima tahun ke depan yaitu 2015-2019, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu: ***Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.***

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2017 disusun berdasarkan dengan Tujuan yang akan diwujudkan Kementerian Koperasi dan UKM, serta dengan berpedoman sasaran nasional di bidang Koperasi dan UMKM yang dituangkan di dalam RPJMN 2015- 2019. Penjabaran sasaran nasional di bidang Koperasi dan UMKM, serta sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian, dengan indikator
 - a. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)
 - b. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun)
 - c. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun)
 - d. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)

2. Meningkatnya daya saing UMKM, dengan indikator:
 - a. Pertumbuhan produktivitas UMKM (rata-rata/tahun)
 - b. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019)
 - c. Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk (target tahun 2019)
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif, dengan indikator: Pertambahan jumlah wirausaha baru (kumulatif selama 5 tahun)
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, dengan indikator:
 - a. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019)
 - b. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata-rata/tahun)
 - c. Pertumbuhan volume usaha koperasi (rata-rata/tahun)

A.2 Bidang Perindustrian

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan perindustrian. Oleh karena itu, Visi Pembangunan Industri tahun 2015 – 2019 adalah:

“Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

A.3 Bidang Perdagangan

Sesuai dengan sasaran yang tertera pada perjanjian kinerja tahun 2017 bahwa kinerja difokuskan pada meningkatnya perekonomian di berbagai sektor, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain:

1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa. Indikator kinerja meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - Pertumbuhan ekspor nonmigas;
 - Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor; dan
 - Pertumbuhan ekspor jasa
2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional adalah sebagai berikut:
 - Persentase penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor;
 - Presentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional.
3. Peningkatan Akses dan Pangsa Pasar Internasional. Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor adalah:
 - Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) utama;

- Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) prospektif;
- Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar utama;
- Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar prospektif;

Indikator yang digunakan untuk mengukur menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif) adalah:

- Penurunan index Non - Tariff Measures (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO)
- Penurunan rata-rata terbobot tarif di negara mitra (perbedaan dari baseline 2013); dan
- Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal Preferensi (%)

4. Pemantapan Promosi Ekspor dan Nation Branding. Indikator peringkat dan skor pencitraan produk ekspor Indonesia pada 'Simon Anholt Nation Brand Index (NBI). Dalam mendukung peningkatan kinerja promosi diperlukan kelembagaan ekspor yang berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja optimalnya kelembagaan ekspor adalah:

- Peningkatan pemanfaatan laporan pasar ekspor (market intelligent dan market brief} oleh dunia usaha;
- Pendirian Lembaga/ Kantor Perwakilan / Pusat Promosi di dalam dan luar negeri (unit); dan
- Persentase PMKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir baru.

5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa. Peningkatan ekspor ataupun penguatan pasar dalam negeri. Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya efektivitas pengelolaan ekspor adalah Penurunan pangsa impor barang konsumsi terhadap total impor.

6. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan adalah pertumbuhan PDB sub kategori Perdagangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya konektivitas distribusi dan logistik nasional adalah:

- Jumlah Pasar Rakyat Tipe A;
- Jumlah Pasar Rakyat Tipe B;
- Jumlah Pusat Distribusi Regional (PDR);
- Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat Tipe A yang telah direvitalisasi.

7. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN). Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya Konsumsi produk Dalam Negeri dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional adalah peningkatan kontribusi produk dalam negeri. Dalam konsumsi rumah tangga nasional. Indikator ini menggambarkan besarnya proporsi penggunaan produk dalam negeri terhadap konsumsi rumah tangga secara nasional.

8. Optimalisasi/ Penguatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dari pemanfaatan perdagangan berjangka komoditi, SRG, dan Pasar Lelang:

- Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK);
- Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan;
- Pertumbuhan Nilai Transaksi di Pasar Lelang.

9. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- a. Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Daerah

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan.

b. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja stabilisasi harga barang kebutuhan pokok adalah koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu pokok adalah Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah.

c. Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar di Wilayah Perbatasan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pengelolaan perdagangan perbatasan adalah persentase barang beredar diawasi yang sesuai ketentuan di daerah perbatasan darat.

10. Peningkatan Perlindungan Konsumen. Indikator yang digunakan sebagai ukuran kinerja meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa adalah:

- Indeks Keberdayaan Konsumen
- Persentase barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku;
- Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan;
- Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (U'ITP) yang bertanda tera sah yang berlaku.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif
6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

9. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
10. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
11. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
12. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
14. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam RPJMD Kabupaten Berau tahun 2017-2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau sebagai berikut :

1. Jumlah koperasi aktif
2. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
3. Pertumbuhan industri
4. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
5. Ekspor bersih perdagangan
6. Peningkatan PDRB
7. Jumlah PDRB

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 95 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 80 s/d <95 : Berhasil
- 50 s/d <80 : Cukup Berhasil
- 0 s/d <50 : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

A.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) yang di kembangkan	IKM	Mengukur perkembangan industri berbasis sumber daya lokal	26 IKM	23 IKM
		Jumlah IKM yang Menggunakan Teknologi Industri	IKM	Mengukur perkembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	15 IKM	9 IKM
2	Meningkatnya kinerja ekspor non migas Berau	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	%	Mengukur peningkatan aktifitas perdagangan lokal	65%	58,27%
		Jumlah aduan ketidakpuasan konsumen	kasus	kerjasama antara OPD dengan pelaku usaha perlindungan konsumen harus berjalan baik	40 Kasus	60 Kasus
3	Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah	Jumlah Wira Usaha yang Memiliki Keunggulan Kompetitif (UKM)	Nilai	mengukur Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang UKM serta koperasi	30 UKM	32 UKM
		Jumlah UMKM yang dibina (UMKM)	Nilai	Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM	60 UKM	60 UKM

Dilihat dari capaian indikator kinerja utama tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau belum sepenuhnya dapat tercapai.

1. Jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) yang di kembangkan hanya mencapai angka 23 dari target 26 Industri Kecil Menengah. Hal ini disebabkan karna perhitungan angka kinerja ini di dasarkan pada

berkembangnya industri menengah yang berbasis sumber daya lokal. Sehingga kegiatan berfokus pada varian sumber daya lokal yang ada yang disesuaikan dengan dana yang tersedia;

2. Sama halnya dengan angka jumlah Industri kecil dan menengah yang berbasis teknologi industri. Sampai dengan akhir tahun 2017 hanya tercatat pertumbuhan IKM sebanyak 9 unit dari target 15 unit pada awal tahun 2017. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat atau pelaku usaha terhadap teknologi industri yang sedang berkembang. Serta tidak memadainya modal yang dimiliki untuk memindahkan system industri tradisional menjadi industri modern;
3. Presentase pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat pada tahun 2017 mencapai angka 58,27 % dari target 65%. Diukur dari peningkatan aktifitas perdagangan di pasar lokal. Angka ini cukup tinggi mengingat pada tahun 2014 tingkat aktifitas perdagangan di pasar lokal sangat lemah;
4. Angka jumlah aduan ketidak puasan konsumen menunjukkan angka yang sangat baik. Dari target 60 kasus aduan yang mungkin diterima, SKPD hanya menerima 40 aduan selama tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama dan komunikasi antara konsumen dan pelaku usaha terjalin dengan baik;
5. Jumlah Wira Usaha yang Memiliki Keunggulan Kompetitif (UKM) pada tahun 2017 meningkat sebanyak 32 UKM dari target sebanyak 30 UKM. Hal ini menunjukkan peningkatan investasi dibidang perdagangan, UKM dan Koperasi selama tahun 2017 meningkat pesat melebihi target yang direncanakan. Hal ini dikarenakan meningkatnya daya Tarik dan pengetahuan masyarakat atas ilmu perkoperasian, serta meningkatnya arus perdagangan baik di dalam maupun keluar daerah;
6. Jumlah UMKM yang dibina yang dibina selama tahun 2017 adalah sebanyak 60 UMKM dengan presentase pencapaian target sebesar 100% dihitung dari jumlah UMKM yang menerima bantuan modal untuk

pengembangan usaha, sesuai dengan yang telah direncanakan pada awal tahun 2017.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012 s/d Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2012	2013	2014	2015	2017
1	Jumlah koperasi aktif	216	232	237	257	269
2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB		7,77	7,56	14,56	4,06
3	Pertumbuhan industri		0,40	13,49	(16,29)	0,34
4	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10,75	10,61	11,31	11,63	5,89
5	Ekspor bersih perdagangan	4.999.938.751,42	1.347.687.682,38	1.289.023.255,34	1.265.483.890,71	1.070.445.618.490
6	Peningkatan PDRB		21,75	15,47	10,19	7,92
7	Jumlah PDRB	14.558.923,85 (juta rupiah)	17.725.234,38 (juta rupiah)	20.467.252,87 (juta rupiah)	22.553.657,68 (juta rupiah)	24.341.009,67 (juta rupiah)

Indikator kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam kurun waktu 5 tahun sangat fluktuatif disebabkan kondisi internal yang mempengaruhi kinerja aparatur dan kondisi eksternal yaitu situasi perekonomian lokal dan nasional yang cenderung berubah-ubah.

A.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dari 3 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 7 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Berhasil	3
2	Berhasil	1
3	Cukup Berhasil	-
4	Kurang Berhasil	3
	Jumlah	7

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	95 s/d 100
1	Meningkatnya jumlah koperasi	1	298,89				Sangat Berhasil
2	Meningkatnya nilai volume usaha	4	63,47		Cukup Berhasil		
3	Meningkatnya perekonomian melalui berbagai sektor	2	152.54				Sangat Berhasil

A.4. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi kinerja sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau akan dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah koperasi

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah koperasi dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 298,89% dengan predikat sangat berhasil. Keberhasilan ini disebabkan antara lain meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya koperasi dalam meningkatkan perekonomian. Kondisi ini juga disebabkan berjalannya proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.

Sasaran 2 : Meningkatnya nilai volume usaha

Indikator kinerja pada sasaran ini terdiri atas 4 (empat) indikator yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB telah ditetapkan dalam RPJMD adalah 15% dari total PDRB, sedangkan dalam realisasinya hanya tercapai sebesar 4,06%. Hal ini disebabkan melemahnya beberapa usaha industri pengolahan di Kabupaten Berau seperti industri makanan dan minuman, karet dan lain-lain. Kondisi harga bahan baku yang mahal membuat para pelaku industri pengolahan membatasi jumlah produksi mereka

2. Pertumbuhan industri

Berikut akan disajikan tabel pertumbuhan industri sejak tahun 2011 hingga tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pertumbuhan Industri Tahun 2011-2017

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2017
Jumlah IKM	230	686	725	838	895	898

Dari tabel diatas jumlah industri kecil menengah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan walaupun pada tahun akhir periode RPJMD jumlah peningkatan industri kecil menengah tidak terlalu besar. Namun bila dilihat secara keseluruhan jumlah industri yang menjadi target dalam RPJMD dapat dipenuhi. Peningkatan ini membawa pengaruh positif terhadap tingkat perekonomian terutama sektor ekonomi riil. Peningkatan pertumbuhan industri di Kabupaten Berau didominasi oleh tumbuhnya industri kecil menengah di bidang pangan

a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 5,89% masih dibawah target RPJMD yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih mendominasinya sektor pertambangan dan struktur perekonomian Kabupaten Berau

b. Ekspor bersih perdagangan

Pada RPJMD ditetapkan target ekspor bersih perdagangan sebesar USD 571.561.415,63. Tahun 2017 data realisasi ekspor berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk 3 komoditas yaitu batubara, sawit dan kernel sebesar USD 1.070.445.618.490. Angka ini menunjukkan pencapaian target diatas 100% atau tepatnya 187,18%. Pencapaian ini tentunya hasil kerja maksimal aparat Dinas Koperindag Kab. Berau untuk berperan aktif dalam mendorong dan mengadministrasikan kegiatan ekspor tersebut dalam ijin SKA

Sasaran 3 : Meningkatnya perekonomian melalui berbagai sektor

Perekonomian Kabupaten Berau selama kurun waktu 2011 hingga 2017 terus mengalami perlambatan. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Berau yang hanya mencapai 7,92 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 10,19 persen. Target laju pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD adalah 9,05 persen sehingga capaian keberhasilannya hanya 87,51 persen sedangkan jumlah PDRB tahun 2015 sebesar 24.341.009,67 (dalam juta rupiah) melebihi target RPJMD yang hanya 11.188.000,00 (dalam juta rupiah). Namun besarnya kenaikan nilai PDRB dikarenakan terjadinya perubahan dalam metode perhitungan PDRB yang berasal dari perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 menjadi tahun 2010.

Struktur perekonomian Kabupaten Berau masih didominasi lapangan usaha berbasis sumberdaya alam yaitu pertambangan dan penggalian yang terlihat dari besarnya peranan kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Berau. Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan diikuti kategori berbasis sumberdaya alam juga yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan kemudian transportasi dan pergudangan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya dibawah 5 persen.

Pada tahun 2015 terjadi perubahan laju pertumbuhan yang biasanya tinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian namun berasal dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 19,77 persen. Lapangan usaha industri pengolahan justru mengalami pertumbuhan negative sebesar -1,00 persen. Dari paparan diatas bisa dikatakan bahwa selama kurun waktu lima tahun struktur perekonomian Kabupaten Berau tidak berubah signifikan.

Pada tabel berikut terlihat perbandingan jumlah PDRB dan pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2012 hingga 2017. Nilai PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha. Nilai tabel dalam juta rupiah

Tabel 3.6
Perbandingan Jumlah PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	2012	2013	2014	2015	2017
Jumlah PDRB	14.558.923,85	17.725.234,38	20.467.252,87	22.553.657,68	24.341.009,67
Laju Pertumbuhan Ekonomi		21,75	15,47	10,19	7,92

Dari tabel diatas, terlihat bahwa walaupun nilai atau jumlah PDRB mengalami kenaikan sebesar Rp 1.787.351,99 namun apabila dibandingkan kenaikan nilai PDRB tahun sebelumnya masih lebih kecil dimana kenaikan nilai PDRB tahun sebelumnya sebesar Rp 2.086.404,81. Laju pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Terlebih dalam komposisi PDRB diatas kenaikan nilai PDRB masih disumbang dari sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Sementara sektor lain mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa belum terjadi peningkatan perekonomian dalam berbagai sektor sehingga menjadi tugas pemerintah bersama seluruh stakeholder yang ada untuk meningkatkan peran sektor-sektor lain yang jauh lebih memiliki daya tahan terhadap krisis ekonomi dibanding sektor pertambangan dan penggalian yang harga jualnya sangat fluktuatif.

Sektor ekonomi yang berbasis sumber daya alam lokal yang dapat diperbaharui menjadi prioritas untuk dikembangkan karena sektor ini selain memiliki daya tahan terhadap krisis ekonomi juga melibatkan sektor riil di perekonomian seperti UMKM dan IKM. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau untuk meningkatkan kualitas UMKM dan IKM di Kabupaten Berau untuk menunjang program peningkatan ekonomi daerah.

B. Realisasi Anggaran

Program pembangunan koperasi, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Berau pada tahun 2017 yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) terdiri dari 15 (Lima belas) Program dan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan. Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau pada tahun 2017 g sebesar Rp.20.207.698.758,00 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), dengan rincian Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 2.162.810.000,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan Barang dan Jasa sebesar Rp 13.252.270.124,00 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah Seratus Dua Puluh Empat Rupiah), serta belanja modal sebesar Rp. 3.276.078.400,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Pulu Enam Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

Dari hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD tahun Anggaran 2017 akan dijelaskan Belanja Langsung dengan realisasi fisik mencapai 87.65 % dan realisasi keuangan mencapai 92,50 % dari total anggaran tahun 2017 sebesar dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 18.691.158.524,-. Berikut evaluasi Renja SKPD tahun anggaran 2017 :

Tabel 3.7

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran. (Rp)	Realisasi (Rp)
------------------	-------------------	--------	------------------	----------------	----------------

Administrasi Kantor	Terlaksananya tertib administrasi kantor dan surat menyurat	1 Paket	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,-	1.990.000,-
Dinas Koperindag	Tersedianya sarana informasi komunikasi, air dan listrik	1 Paket	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	109.445.200,-	85.023.023,-
Dinas Koperindag	Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas	20 kendaraan Dinas	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas /Operasional	143.298.500,-	118.690.897,-
Aparatur	Tersedianya tunjangan honor dan lembur	50 orang	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	231.130.000,-	215.530.000,-
Dinas Koperindag	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Paket	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.950.000,-	6.950.000,-
Dinas Koperindag	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	1 Paket	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000,-	16.450.000,-
Dinas Koperindag	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000,-	24.963.000,-
Dinas Koperindag	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.900.000,-	24.764.000,-
Dinas Koperindag	Tersedianya alat listrik dan penerangan	1 Paket	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000,-	14.495.000,-
Dinas	Tersedianya peralatan dan	1 Paket	Penyediaan peralatan dan	76.350.000,-	76.050.000,-

Koperindag	perlengkapan kantor		perlengkapan kantor		
Dinas Koperindag	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	4 surat kabar	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.620.000,-	17.620.000,-
Aparatur dan Tamu	Tersedianya konsumsi rapat dan tamu	12 kali	Penyediaan Makan dan Minuman	23.900.000,-	22.910.000,-
Aparatur	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	320.780.000,-	318.570.640,-
Aparatur	Terlaksananya Perjalanan dalam daerah	1 Paket	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	105.500.000,-	105.265.000,-
Aparatur	Tersedianya honor dan lembur	16 orang	Penyediaan jasa administrasi/tek-nis perkantoran	556.250.000,-	551.856.451,-
Dinas Koperindag	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 kali	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	18.454.000,-	18.454.000,-
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	60.300.000,-	49.960.000,-
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	50.000.000,-	36.960.000,-
Aparatur	Terlaksananya bimtek peraturan perundang-undangan	1 tahun	Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	75.502.200,-	75.502.200,-
Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi kinerja program SKPD	1 kali	Sosialisasi kinerja program SKPD	35.000.000,-	35.000.000,-

Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2017

Aparatur	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi lingkup koperindag	5 kali	Konsolidasi perencanaan koperasi, perindustrian dan perdagangan	250.000.000,-	249.048.889,-
Diskoperindag. program Kegiatan	Terlaksananya LAKIP & Renstra	1 kali	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	94.380.000,-	92.215.600,-
			Fasilitas kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah	327.238.450,-	326.838.450,-
Koperasi dan UKM	Terlaksananya pemberdayaan terhadap Koperasi	30 Koperasi 24 Org	Pemberdayaan koperasi dan UKM	793.365.600,-	357.786.969,-
Pelaku Usaha	Terlatihnya Pelaku Usaha	109 Orang	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	319.387.100,-	319.387.100,-
Pelaku Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Koperasi	9 Kecamatan	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	134.437.900,-	132.742.900,-
UMKM	Termonitornya Penunggak dana bergulir	15 jenis produk	Pemantauan Pengelolaan dana Pemerintah bagi UMKM	301.443.000,-	282.329.000,-
Produk UKM yang potensi dari pelaku	Jumlah Produk yang di promosikan	6 Kecamatan 18 Koperasi	Penyelenggaraan Promosi produk UMKM	237.000.000,-	235.783.464,-

usaha					
UKM	Tersedianya Database UMKM	30 Koperasi	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	146.805.000,-	139.521.490,-
Pelaku Koperasi	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perkoperasian	24 koperasi 100 %	Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman Perkoperasian	112.915.600,-	112.175.850,-
Koperasi	Terwujudnya Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Kpd Koperasi	70 Pelaku Usaha	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi	243.374.400,-	241.269.400,-
Koperasi	Terlaksananya Revitalisasi bagi Koperasi	370 alat terra UTP	Revitalisasi Bagi Koperasi	113.727.050,-	110.750.350,-
Pedagang dan konsumen	Terlaksananya penyelesaian sengketa konsumen	40 pedagang	Fasilitasi Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	255.484.000,-	221.477.700,-
Pedagang	Terlaksananya pengawasan barang dan jasa	200 Org 20 Ekspor tir	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	250.000.000,-	212.777.770,-
Pedagang	Terlaksananya tera ulang alat (UTTP)	200 Pedagang	Operasional dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	223.228.478,-	200.554.878,-
Pedagang	Terlaksananya sosialisasi	1 Paket	Sosialisasi kebijakan dan peraturan tentang perlindungan konsumen	106.100.000,-	61.084.000,-
Aparatur	Terlaksananya Kegiatan Rakor PEPIDA	60 Pedagang	Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah	125.956.200,-	125.835.300,-

Eksportir	Terlaksananya forum Komunikasi SKA	100 %	(PEPIDA) Forum Komunikasi surat keterangan Asal (SKA) bidang perdagangan luar negeri.	68.378.450,-	56.358.450,-
Pedagang	Tercapainya Kemudahan perijinan pengembangan Usaha	6 kali	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	118.884.230,-	107.556.730,-
Pedagang	Terlaksananya pembangunan pasar rakyat	60 Org	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	1.924.700.000,-	1.871.480.500,-
Pedagang	Meningkatnya jaringan informasi harga komoditi dan stok barang strategis	-	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	145.168.000,-	135.394.064,-
Pasar	Terlaksananya operasional pasar	38 IKM	Kegiatan Operasional Pasar Adji Dilayas	8.423.101.900,-	8.215.342.359,-
Masyarakat	Terlaksananya Pasar murah		Pelaksanaan Pasar Murah	139.706.800,-	122.736.800,-
Pedagang dan Konsumen	Terlaksananya sosialisasi peraturan dan kebijakan tentang retribusi	15 IKM	Sosialisasi peraturan dan kebijakan tentang retribusi pasar.	267.090.000,-	244.272.700,-
Pasar	Tersedianya sarana dan prasarana pasar yang memadai	5 IKM	Sarana dan Prasarana Pasar	766.430.300,-	704.279.800,-

IKM	Terlaksananya pembelajaran pengolahan hasil kelautan dan gelar produk IKM	8 IKM	Fasilitasi bagi industry kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya	421.503.300,-	356.510.300,-
IKM	Terlatihnya IKM Kerajinan Limbah Kelapa		Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri	284.793.800,-	262.174.100,-
IKM pangan	Terlaksananya serifikasi halal bagi IKM pangan		Fasilitasi Sertifikasi Halal	271.209.500,-	190.422.900,-
Pelaku IKM pangan	Terlaksananya pembelajaran pembuatan desain dan kemasan IKM pangan		Pembinaan kemampuan teknologi industri	269.509.800,-	211.213.500,-

Dalam kurun waktu 1 tahun, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah di susun pada awal tahun 2017. Dari jumlah realisasi anggaran yang telah dijabarkan pada tabel di atas, pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Total surat menyurat yang dikirimkan adalah sebanyak 276 eksemplar, berkaitan dengan masalah kedinasan yang dikirim baik ke dalam maupun

- luar daerah Kabupaten Berau. Mencakup surat-menyurat administrasi ASN Koperindag Kabupaten Berau, Laporan Program, Keuangan, Perkoperasian, Perindustrian, Perdagangan serta administrasi dan masalah pasar-pasar yang dikelola oleh SKPD (1paket);
2. Jasa Komunikasi dalam hal ini telepon dan internet, jasa air dan listrik dapat terpenuhi untuk menunjang kegiatan rutin SKPD selama 12 bulan (1paket);
 3. Kendaraan Dinas yang mendapatkan pemeliharaan adalah sebanyak 22 kendaraan dari target 20 kendaraan;
 4. Jasa Administrasi Keuangan serta tunjangan, honor dan lembur di bayarkan kepada 50 orang karyawan;
 5. Alat-alat kebersihan kantor, dan Alat Tulis Kantor telah disediakan secara penuh sesuai kebutuhan selama tahun 2017 (1paket);
 6. Barang cetak dan pengadaan yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan baik kegiatan rutin maupun kegiatan bidang-bidang yang ada pada SKPD sebesar Rp. 24.764.000,- telah mampu dipenuhi sampai dengan 31 Desember 2017 (1paket);
 7. Sebanyak 6 unit peralatan dan perlengkapan penunjang kegiatan telah disediakan selama tahun 2017 (1paket);
 8. Bahan bacaan berupa 4 jenis surat kabar (Koran) dan majalah telah terpenuhi sampai dengan bulan Desember 2017;
 9. Makanan dan Minuman untuk menunjang pelaksanaan rapat intern maupun rapat dengan pihak SKPD telah dipenuhi selama 12 bulan;
 10. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 46 kali ke berbagai daerah / provinsi di Indonesia;
 11. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah Kabupaten Berau dilaksanakan sebanyak 121 kali selama tahun 2017;
 12. Pakaian Dinas Harian (PDH) telah disediakan bagi 56 karyawan kantor pada Dinas Koperindag Kab. Berau tahun 2017;
 13. Bimbingan Teknis guna meningkatkan pengetahuan dan sumber daya aparatur diikuti sebanyak 9 kali;

14. Pameran pembangunan guna melaksanakan sosialisasi kinerja program SKPD telah dilaksanakan sebanyak 1 kali;
15. Konsolidasi program yang berkaitan dengan bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan sebanyak 7 kali dari target kinerja 5 kali;
16. Laporan LAKIP tahun 2015/2017 dan RENSTRA tahun 2017-2021 telah diselesaikan dan diedarkan kepada pihak-pihak terkait;
17. Koperasi yang didampingi untuk diberdayakan sebanyak 28 Koperasi dari target 30 koperasi, hal ini dikarenakan adanya selisih kurang atas harga yang dianggarkan dengan harga yang dibayar pada pelaksanaan kegiatan sehingga total dana kegiatan yang tersedia tidak mencukupi;
18. Pelatihan kewirausahaan telah dilaksanakan bagi 24 orang pelaku usaha di Kabupaten Berau;
19. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi telah dilaksanakan dalam 3(tiga) tahap dan telah diikuti sebanyak 110 peserta dari total target 109 orang peserta;
20. Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi UMKM telah dilaksanakan di 8 Kecamatan yaitu Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk dan Pulau Derawan. Sedangkan target awal adalah sebanyak 9 Kecamatan. Pemantuan ke kecamatan Biatan tidak terlaksana, mengingat pengelolaan di Wilayah Tanjung Redeb memerlukan perhatian dan biaya yang lebih besar dari yang dianggarkan;
21. Terdapat 21 jenis produk UMKM yang dipromosikan dalam berbagai kesempatan pameran UMKM yang diikuti selama tahun 2017. Jumlah tersebut melebihi target awal promosi yang hanya sebanyak 15 produk saja;
22. Sosialisasi orinsip-prinsip pemahaman perkoperasian diberikan terhadap 20 koperasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Berau. Angka capaian kinerjanya adalah 111% dari target 18 koperasi;
23. Pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi berprestasi yang ditargetkan mencapai 30 koperasi, hanya tercapai sebesar 89% atau sebanyak 27 koperasi. Hal ini dikarekan minimnya koperasi yang masuk ke

- dalam kategori “berprestasi” di wilayah Kabupaten Berau. Sehingga pembinaan harus lebih ditingkatkan;
24. Revitalisasi bagi koperasi yang hamper non aktif adalah sebanyak 23 koperasi (95,9%);
 25. Permasalahan pengaduan konsumen yang masuk selama tahun 2017 adalah sebanyak 32 kasus, seluruh kasus tersebut ditindak lanjuti dan diselesaikan sebanyak 6 kasus, dan sisanya masih berproses sampai memasuki tahun 2017;
 26. Pengawasan yang dilakukan untuk menekan peredaran barang dan bahan berbahaya pada pangan di wilayah Kabupaten Berau telah dilakukan pada 72 pelaku usaha (102%);
 27. Pelaksana tera ulang di pasar-pasar tradisional yaitu pasar Sanggam Adji Dilayas, dan Pasar Teluk Bayur mencapai 390 alat;
 28. Sosialisasi kebijakan dan peraturan tentang perlindungan konsumen diberikan kepada 60 pedagang di Pasar Sanggam Adji Dilayas, dari target sebanyak 40 pedagang (150%);
 29. Rakor PEPIDA diikuti sebanyak 12 orang ASN Koperindag Kabupaten Berau (100%);
 30. Surat Keterangan Asal telah diterbitkan sebanyak 82 lembar selama tahun 2017 dan memenuhi target 20 ekportir (100%);
 31. Rekomendasi bagi perijinan pengembangan usaha yang diterbitkan selama tahun 2017 adalah sebanyak 162 pedagang atau hanya sebesar 81% dari target 200 pedagang. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya legalitas bagi usahanya;
 32. Pembangunan Pasar Rakyat telah dilaksanakan di wilayah Bangun Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau (1paket);
 33. Kegiatan administrasi dan operasional di Pasar Sanggam Adji Dilayas telah dipenuhi selama 12 bulan, termasuk didalamnya pembayaran jasa listrik, air serta honor karyawan (100%);
 34. Pasar murah telah dilaksanakan di 6 kecamatan selama tahun 2017 (100%);

35. Sosialisasi peraturan dan kebijakan tentang retribusi pasar telah diberikan kepada 60 orang pedagang (100%);
36. Sarana dan prasarana di pasar Sanggam Adji Dilayas dan pasar Teluk Bayur telah terpenuhi selama 12 bulan, termasuk didalamnya penyediaan kertas retribusi ruko dan parkir (100%);
37. Sebanyak 15 orang perwakilan dan Industri Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Berau telah mengikuti pembelajaran mengenai pengolahan hasil kelautan dan gelar produk pada tahun 2017 (100%);
38. Sebanyak 5 Industri Kecil dan Menengah (15 orang) telah mengikuti kegiatan pelatihan Limbah Kelapa pada tahun 2017 (100%);
39. Sertifikasi Halal diberikan kepada 10 IKM di Kabupaten Berau (125%);
40. Pembelajaran pembuatan design kemasan diberikan kepada 25 IKM di Kabupaten Berau tahun 2017 (100%).

Pencapaian target kinerja SKPD secara keseluruhan untuk Diskoperindag selama tahun 2017 adalah 93%. Angka ini merupakan prestasi yang akan dipandang sebagai pemacu semangat dan kerja ASN di tahun yang akan datang. Dengan melihat berbagai kendala yang telah dihadapi tersebut sebagai pembelajaran dan perbaikan pada pelaksanaan program dan kegiatan berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau tahun 2017 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan good governance. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2017 yang mengindikasikan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperindag Kabupaten Berau melalui indikator-indikator bervariasi. Dari tujuh indikator yang ada tiga indikator sangat berhasil, 1 berhasil dan 3 kurang berhasil.

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.